

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIODISASI TUGAS  
KEPALA SEKOLAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
(Studi Kasus Pada SDN Kartasura 02)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Srata II  
Jurusan Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana**

**Disusun oleh:  
NURJANAH  
NIM: Q 100110101**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIODISASI TUGAS  
KEPALA SEKOLAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
(Studi Kasus Pada SDN Kartasura 02)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**NURJANAH**

**NIM: Q 100110101**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Prof. Dr. Utama, M.Pd.', written in a cursive style.

**Prof. Dr. Utama, M.Pd.**

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIODISASI TUGAS KEPALA SEKOLAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus Pada SDN Kartasura 02)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari, Rabu 15 Nopember 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

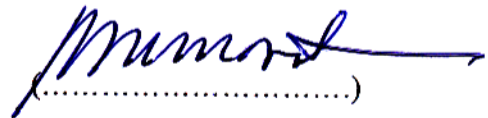
1. Prof. Dr. Utama, M.Pd.

(Ketua Dewan Penguji)



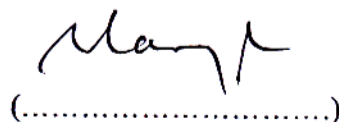
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd

(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dr. Maryadi, MA

(Anggota II Dewan Penguji)



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sekolah Pascasarjana

Direktur



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Nopember 2017

Yang membuat pernyataan



Nurjanah

Q100110101

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERIODISASI TUGAS  
KEPALA SEKOLAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
(UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
(Studi Kasus pada SDN Kartasura 02)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah. 2) Untuk mendeskripsikan keunggulan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah. 3) Untuk mendeskripsikan kelemahan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah. 4) Untuk mendeskripsikan alternatif pembenahan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.

Penelitian ini termasuk penelitian naturalistik fenomenologis dengan pendekatan etnografi yang dilakukan di SDN Kartasura 02. Pendekatan ini berorientasi deskriptif naturalistik. Data diperoleh dari hasil wawancara dari studi di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Kesimpulan penelitian adalah: 1) Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan periodisasi melalui pendataan kepala sekolah yang masa tugasnya 8 tahun ke atas untuk persiapan penilaian kinerja dari dinas pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan. 2) Keunggulan kebijakan periodisasi : dapat memotivasi kerja kepala sekolah karena ada penilaian kinerja, memberi peluang bagi guru-guru muda yang berprestasi untuk menjadi kepala sekolah, memberikan iklim dan suasana sekolah yang berbeda karena ada pergantian pimpinan. 3) Kelemahan pelaksanaan kebijakan periodisasi: kepala sekolah yang turun menjadi guru semangat kerjanya menurun, guru-guru senior lebih memilih menjadi guru daripada menjadi kepala sekolah, apalagi tugas kepala semakin berat, sehingga penjarangan bakal calon kepala sekolah tidak bisa terpenuhi kuotanya, dengan alasan sebagian besar takut terkena periodisasi. 4) Alternatif pembenahan kebijakan periodisasi: kepala sekolah yang terkena periodisasi sebaiknya dimutasikan agar tidak mengganggu kinerja kepala sekolah yang baru, kepala Sekolah yang berprestasi tetap dipertahankan walaupun sudah 2 atau 3 kali masa jabatan, namun juga perlu dimutasikan ke sekolah yang lain yang nilai akreditasinya lebih tinggi atau dipromosikan menjadi pengawas sekolah.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, periodisasi tugas, kepala sekolah

## ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To describe the steps of implementation of the task periodization policy of the principal. 2) To describe the superiority of the principal task policy of the principal. 3) To describe the weakness of policy periodization task of principal. 4) To describe alternative revamping of policy periodization of task of principal.

This research includes naturalistic phenomenological research with ethnography approach done at SDN Kartasura 02. This approach is naturalistic descriptive oriented. Data were obtained from interviews from field studies. Techniques of data collection using observation, interviews, and documentation. Data using descriptive analysis. Data validity using triangulation.

The conclusions of the research are: 1) Steps for the implementation of the periodization policy through the data collection of principals whose working period is 8 years and above for the preparation of performance appraisal from the education office according to the schedule determined. 2) Performance Excellence Periodicity: can motivate principals' work because of performance appraisals, provide opportunities for young teachers who excel to become principals, provide a different climate and school atmosphere because there is a change of leadership. 3) Weakness in the implementation of Periodic Period Policy: School principals who decline to become teachers decrease their morale, senior teachers prefer to become teachers rather than become principals, let alone the task of the head more severe, so that the prospective candidate of headmaster can not be fulfilled quota, big fear of periodization. 4) Alternative Periodic Performance Policy: School-headed Periodic Periods should be transferred so as not to disrupt the performance of new principals, School Principals who are achievers are retained despite 2 or 3 term tenure, but also need to be transferred to other schools with more accreditation value high or promoted to school supervisor.

Keywords: Implementation of policy, task periodization, principal

### 1. Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan agar mampu menjejajarkan dengan negara-negara maju di dunia. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah berupaya meningkatkan sumber daya manusia dengan berbagai bentuk pelatihan dari tingkat daerah sampai dengan ke tingkat pusat.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah memegang peranan yang utama untuk menentukan kualitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Penelitian Elicanah M. Mosiori, & Ruth W. Thinguri (2015). Menjelaskan bahwa kepala sekolah

mempunyai kapasitas untuk menjadikan pendidikan sekolah berkualitas, Sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah tentu bukan pekerjaan yang sederhana, namun demikian kenyataan yang terjadi di lapangan, terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 yang isinya pemberlakuan periodisasi tugas kepala sekolah mendapat tanggapan yang beragam baik dari kalangan kepala sekolah itu sendiri maupun dari guru.

Pemberlakuan pembatasan masa tugas kepala sekolah memang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan, namun demikian munculnya Permendiknas Tahun 2010 tersebut juga membuat risau di kalangan kepala sekolah. Sebenarnya periodisasi itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan manakala kepala sekolah dapat melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksinya, karena pada dasarnya periodisasi itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembatasan masa tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan guru maupun kepala sekolah, ketika kepala sekolah tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi dimungkinkan sekolah akan mengalami kemunduran. Jadi sebenarnya periodisasi ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Adanya pembatasan atau periodisasi tugas pimpinan sekolah menjadi angin segar bagi guru yang dipimpin kepala sekolah yang otoriter, di sisi lain periodisasi itu memberi peluang bagi para guru muda yang berprestasi untuk memimpin sekolah demi kemajuan pendidikan.

Pembatasan tugas kepala sekolah memungkinkan munculnya berbagai persepsi atau penafsiran yang berbeda baik di kalangan kepala sekolah maupun guru. Pembatasan tugas kepala sekolah menjadi pukulan bagi sebagian besar kepala sekolah, mereka tidak siap bilamana harus menjadi guru kembali. Pengalaman kepala sekolah dalam memimpin dijadikan bahan pertimbangan

untuk perubahan penempatan kepala sekolah. Hafedh Azaiez & John R. Slate (2017).

Pelaksanaan periodisasi di UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura sudah pernah dilaksanakan beberapa tahun silam, seiring dengan berjalannya waktu baru tahun 2017 di laksanakan penilaian kinerja kepala sekolah kembali sesuai prosedur, sedangkan hasil penilaian sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Khusus untuk kepala SDN Kartasura 02, belum termasuk dalam penilaian kinerja karena belum mempunyai masa tugas kepala sekolah sesuai yang dipersyaratkan oleh dinas pendidikan untuk dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik fenomenologis. Pendekatan diterapkan dengan mengamati fenomena-fenomena dunia konseptual yang diamati melalui tindakan dan pemikiran guna memahami makna yang disusun oleh subjek di sekitar kejadian sehari-hari. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fakta dan pandangan subjek tentang periodisasi tugas kepala sekolah di SDN Kartasura 02.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) wawancara, 2) Observasi, 3) dokumentasi. Sedangkan narasumber dalam wawancara tersebut antara lain; Kepala Sekolah, guru kelas SDN Kartasura 02, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2009:273) menyebutkan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi waktu.

Teknik Analisis data dilakukan melalui alur menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola dan menemukan apa yang bermakna untuk disarikan secara sistematis Bogdan dan Biklen dalam Utama (2011:233). Dalam menganalisa data ini, penulis



mengumpulkan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dari responden, kemudian data yang relevan dikelompokkan, dan disarikan. Sedangkan data yang tidak relevan dibuang, kemudian dibuat laporan dalam bentuk deskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah**

Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah dilakukan melalui beberapa tahapan yang ditempuh, yaitu:

- a. Sosialisasi Permendiknas No 28 Tahun 2010 oleh jajaran dinas pendidikan maupun jajaran UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura kepada para kepala sekolah. Penjelasan dari dinas pendidikan maupun dari kepala UPTD bahwa akan diadakan penilaian kinerja kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala, agar kepala sekolah mempersiapkan dokumen penilaian yang diperlukan.
- b. Pendataan kepala sekolah yang mempunyai masa tugas 8 tahun ke atas untuk persiapan penilaian kinerja dari tim penilai kabupaten. Pelaksanaan penilaian kinerja dari tim penilai kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hasil penilaian dilaporkan ke dinas pendidikan kabupaten, kemudian diserahkan ke pemerintah daerah sebagai pedoman pengambilan keputusan periodisasi tugas kepala sekolah.

#### **3.2 Keunggulan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.**

Keunggulan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah berdasarkan hasil observasi dan wawancara para responden diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Periodisasi tugas kepala sekolah dapat memotivasi kerja kepala sekolah karena ada penilaian kinerja yang akan dilaksanakan secara rutin setiap empat tahun.
- b. Memberi peluang bagi guru-guru muda yang berprestasi untuk menjadi kepala sekolah.

- c. Memberikan iklim dan suasana sekolah yang berbeda karena ada pergantian pimpinan.

### **3.3 Kelemahan pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.**

Kelemahan pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah yang turun menjadi guru, biasanya semangat kerjanya menurun.
- b. Guru-guru senior lebih memilih menjadi guru daripada menjadi kepala sekolah, apalagi tugas kepala semakin berat, sehingga penjarangan calon kepala sekolah tidak bisa terpenuhi kuotanya, dengan alasan sebagian besar takut terkena periodisasi jabatan kepala sekolah.

### **3.4 Alternatif pembenahan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.**

Alternatif pembenahan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah berdasarkan pendapat responden dari hasil wawancara adalah:

- a. Kepala sekolah yang terkena periodisasi sebaiknya dimutasikan agar tidak mengganggu kinerja kepala sekolah yang baru.
- b. Kepala Sekolah yang berprestasi tetap dipertahankan walaupun sudah 2 atau 3 kali masa jabatan, namun juga perlu dimutasikan ke sekolah yang lain yang nilai akreditasinya lebih tinggi atau dipromosikan menjadi pengawas sekolah.

## **4. Penutup**

- 4.1 Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah  
Pendataan masa tugas kepala sekolah kemudian dilanjutkan penilaian kinerja ada kesesuaian dengan teori oleh Valliamah Shoma Vally G & Khadijah Daud (2015) efektifitas sekolah tergantung kepada kemampuan kepala sekolah dalam menentukan visi, misi, dan memimpin sekolah. Untuk itu penilaian kinerja diperlukan.
- 4.2 Keunggulan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah adalah  
Memotivasi kerja kepala sekolah itu sendiri karena ada penilaian kinerja. Ini sesuai dengan teori Gabriel Albu (2012) kepala ada yang ingin tetap

menjadi kepala sekolah, ini berarti kepala sekolah harus bekerja optimal untuk memenuhi standart penilaian kinerja.

#### 4.3 Kelemahan pelaksanaan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.

Kepala sekolah yang turun menjadi guru kinerjanya menurun ini sesuai Abd. Kadim Masaong & Arfan A. Tilomi (2011: 42) adalah hilangnya sambung rasa. Ketika turun menjadi guru biasanya kurang komunikatif atau kurang sambung rasa, sehingga mempengaruhi semangat dalam bekerja, sehingga dapat mempengaruhi kinerja guru lainnya.

#### 4.4 Alternatif pembenahan kebijakan periodisasi tugas kepala sekolah.

Kepala sekolah yang terkena periodisasi sebaiknya dimutasikan agar tidak mengganggu kinerja kepala sekolah yang baru. Ini sesuai teori Hafedh Azaiez & John R. Slate (2017) bahwa pengalaman kepala sekolah dalam memimpin dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan penempatan kepala sekolah.

### Daftar Pustaka

Albu, G. 2012. The Teacher Headmaster and his Relationship with Himself. *Procedia Social and Behavioral Sciences Vol. 78. Hal. 653-657*

7

Azaiez, H & Slate, J. R. 2017. Student Achievement Differences as a Function of Principal Longevity. *Journal of advances in Education Research. Vol. 2. No.3*

Masaong, A.K., & Tilomi, A.A., 2011. *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence (Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang)*, Bandung: Alfabeta.

Mosiori, E.M. & Thinguri, R.W. 2015. A Critical Analysis of the School Headteachers' Capacity in Provision of Quality Education in Primary Schools in Kenya. *International journal of Education and Research. Vol. 3. No.7, Hal. 307-320*

Taram, T. 2013, *Permendiknas No 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah*. <http://teotaram.blogspot.co.id/2013/02/permendiknas-no-28-tahun-2010.html> (diakses 1 September 2017).

- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutama, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairus Media
- Vally, V.S. & Daud, K. 2015. The Implementation of School Based Management Policy: An Exploration. *Procedia social and behavior sciences Vol. 172*. Hal. 693-700